



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Program Otentik SRG
di Kalangan Akademik**

**Komoditi Rumput Laut,
Masuk 'Radar' Bursa Berjangka
dan SRG**

**RG Kopi Aceh Tembus
Rp 21 miliar**

**Menanti Kiprah
Pasar Lelang
Kopi Gayo**

Berita Utama.....4-7
 - Menanti Kiprah Pasar Lelang Kopi Gayo

Interview.....8-9
 - Tantangan PBK di Era MEA

Resi Gudang.....10-11
 - Program Otentik SRG di Kalangan Akademik

Berjangka.....12-13
 - Komoditi Rumput Laut, Masuk 'Radar' Bursa Berjangka dan SRG

Agenda Foto.....14-15

Aktualita.....16-17
 - RG Kopi Aceh Tembus Rp 21 miliar
 - PT Bimasakti Berjangka Kembali Beroperasi
 - Semester II 2016 JFX Luncurkan Produk Syariah
 - Transaksi Rupiah-Renminbi Untungkan Indonesia

Analisa.....18

Breaking News.....19

Info.....20

Info SRG.....21

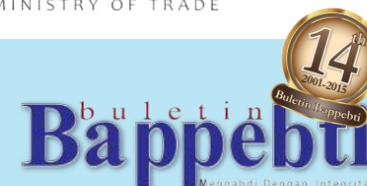
KomiKita...22-24
 SRG Sarana Tunda Jual Komoditas



Kolom...24-25
 SRG Jadi Etalase Pemda di Era MEA



Kiprah...26-27
 Change Or Die



Penerbit
 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
 Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi
 Marthin Simanungkalit

Wakil Pemimpin Redaksi
 Taufik K.S.

Dewan Redaksi
 Subagiyo
 Agus Muharani
 Himawan Purwadi
 Widiastuti
 Natalius Nainggolan
 Annisa F. Wulandari
 Poppy Julianti
 Vera Hendrias
 Tomi Setiawan
 Apriliyanto

Sirkulasi
 Katimin
 Gita Regina

Alamat Redaksi
 Gedung Bappebti
 Jl. Kramat Raya
 No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id



Foto : Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, Direksi JFX dan Direksi KBI foto bersama dengan sejumlah jurnalis dalam acara workshop PBK, di Bandung, Jawa Barat.

Jelang akhir tahun ini, ada banyak peristiwa yang signifikan terhadap perkembangan Sistem Resi Gudang- SRG dan Pasar Lelang Komoditi- di tanah air.

Kabar baik yang pertama datang dari SRG Kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Pada akhir November 2015, lalu, terbit sebanyak 11 Resi Gudang Kopi dengan volume sebesar 360 ton. Sedangkan nilai komoditi kopi yang tersimpan di gudang mencapai Rp 21,28 miliar.

Sisi yang mengembirakan lagi, komoditi kopi sebanyak 360 ton itu adalah milik dari sebanyak 8 Gapoktan. Itu artinya petani kopi di Kab. Aceh Tengah mendapatkan banyak manfaat dari implementasi SRG.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Retno Rukmawati, terbitnya Resi Gudang Kopi itu merupakan prestasi yang memuaskan. Sebab, Resi Gudang Kopi tersebut adalah kali pertama menembus nilai Rp 21,28 miliar di Indonesia.

Dari nilai komoditi kopi sebesar Rp 21,28 miliar itu, Gapoktan memperoleh pembiayaan sebesar Rp 12,12 miliar dari Bank BRI, Cabang Takengon.

Sebelumnya juga, tepatnya pada 9 Oktober 2015, Gudang SRG komoditi kakao di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, menerbitkan 1 Resi Gudang Kakao dengan volume sebesar 3.140 kg atau 3,14 ton. Sedangkan nilai komoditi kakao mencapai Rp 78,5 juta.

Kabar baik yang kedua, datangnya masih dari tanah rencong- Kab. Aceh

Tengah. Wilayah yang dikenal seantero dunia sebagai penghasil kopi dataran tinggi yakni Kopi Gayo, diketahui akan berdiri Pasar Lelang Komoditi Kopi Gayo yang akan diselenggarakan PT Meukat Komoditi Gayo (MKG). Unikny, cikal bakal berdirinya MKG berasal dari Koperasi Baitul Qiradh Baburayan, yang memiliki line bussines sebagai pengumpul dan eksportir Kopi Gayo.

Menurut Direktur Utama, PT MKG, Indra Perwiryanto, tantangan yang masih dihadapi dalam sistem tata niaga kopi adalah sulitnya mengakses pasar secara langsung. Untuk itu salah satu upaya pembenahan yang perlu dilakukan, yaitu mendekatkan petani dan pelaku usaha dengan gerbang pemasaran.

Melihat fakta tersebut, berdirinya MKG sebagai penyelenggara PLK Kopi Gayo, diharapkan menghadirkan solusi strategis bagi petani kopi khususnya yang ada di daerah dataran tinggi Gayo dan Indonesia pada umumnya. Apa lagi saat ini Kopi Gayo telah memiliki sertifikasi Indikasi Geografis dan telah terdaftar di Uni Eropa.

Berdirinya PLK Kopi Gayo yang digagas MKG, juga akan disinergikan dengan gudang SRG yang terdapat di Kab. Aceh Tengah. Jika sinergi ini berjalan sesuai dengan harapan, tentu akan membuktikan kepada kita betapa dahsyatnya manfaat PLK dan SRG kepada petani, khususnya petani Kopi Gayo.

Salam!

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Menanti Kiprah Pasar Lelang Kopi Gayo

Instrumen Pasar Lelang Komoditi (PLK) sangat dibutuhkan untuk Kopi Gayo dan rencananya akan diimplementasikan tahun 2016. Tak cukup itu, PLK tersebut akan bersinergi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Nama Kopi Gayo rasanya tak asing lagi di telinga. Kopi ini merupakan varietas kopi arabika dan menjadi salah satu komoditi unggulan di Aceh. Sentra produksinya berada didataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.

Tercatat, total produksi Kopi Gayo mencapai sekitar 50.000 ton pertahun. Adapun jumlah lahan mencapai 102.000 Ha dengan jumlah petani sebanyak 102.566 orang. Untuk sistem perkebunannya di kelola oleh masyarakat setempat. Atau dapat dibidang seluruhnya merupakan kebun milik masyarakat.

Sekedar informasi, Kopi Gayo menjadi salah satu jenis kopi *specialty* kopi dengan

pengolahan khusus yang berasal dari satu daerah dan memiliki cita rasa khas. Saat ini pun Kopi Gayo sudah mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis dan telah terdaftar di Uni Eropa. Tak heran, pasarnya sudah mendunia dan terus mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga kopi dari daerah lain.

Tapi malangnya, dikalangan pelaku pasar kopi beredar kabar bahwa banyak pelaku nakal yang coba mencampur Kopi Gayo dengan kopi lainnya. Aksi pengoplosan itu tentu saja sangat merusak kualitas keaslian dari Kopi Gayo. Dampaknya bisa jadi akan mempengaruhi permintaan dari pasar domestik maupun luar negeri.

Menurut Yuli Edi Subagio, Kepala

Bagian Pembinaan Pasar lelang dan SRG, Bappebti, salah satu solusi untuk mencegah pengoplosan tersebut yaitu dengan PLK. Dan kabar baiknya, penggodokan pelaksanaan PLK untuk Kopi Gayo dijadwalkan sudah rampung hingga akhir tahun ini. "Jadi diharapkan PLK Kopi Gayo sudah dapat beroperasi tahun 2016," bebarnya.

Fasilitator

Latar belakang rencana pendirian PLK Kopi Gayo memang cukup menarik. Dari penuturan Yuli Edi Subagio, dikatakan, awalnya ada telepon dari teman di Aceh yang menginformasikan, bahwa adanya seorang pelaku usaha yang menginginkan kepastian untuk mendapatkan stok komoditas Kopi Gayo. Baik itu untuk kebutuhan ekspor atau pun stok untuk kebutuhan pada periode tertentu. "Dari komunikasi dan diskusi itulah muncul ide dibentuk PLK khususnya untuk penjualan Kopi Gayo sebagai *coffee specialty arabica*," katanya.

"Kami menelusuri identitas pengusaha tersebut, ternyata ide tersebut muncul dari Ketua Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan yang bernama Ridwan Husein," ujarnya.

Dari pembicaraan via telepon dan kemudian bertatap muka, diperoleh kesan bahwa koperasi ini mewakili dunia usaha kopi di Aceh Tengah dan sekitarnya. Dan mereka memang serius ingin menjadi

Penyelenggara PLK, sambungnya.

Lalu, agar tidak mengganggu bisnis koperasi sebagai pengumpul dan eksportir kopi, maka koperasi ini membentuk unit usaha tersendiri berbentuk Perusahaan Terbatas (PT). Proses pendirian terus dipantau Bappebti hingga terbentuk PT Meukat Komuditi Gayo (sesuai dengan Akta Pendirian disahkan 30 September 2014).

"Pihak PT Meukat Komuditi Gayo (MKG) telah menunjuk direksi untuk melakukan komunikasi intensif dengan Bappebti untuk proses persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang," terangnya.

Menurut Edi, keinginan PT MKG dalam penyelenggaraan pasar lelang berlandaskan bisnis murni- *profit oriented*. Yakni, sebagai pihak yang menghubungkan antara pemilik barang dan pembeli barang baik pelaku usaha lokal, nasional dan luar negeri.

Selanjutnya, untuk menjadi Penyelenggara PLK, PT MKG telah mengirim surat resmi dengan dokumen-dokumen pendukung ke UPTP II Bappebti termasuk dokumen Peraturan Tata Tertib (PTT).

Selain itu telah dibahas juga Peraturan Tata Tertib (PTT) PT MKG di ruang rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Pembahasan PTT tersebut berjalan lancar dan dapat diselesaikan

dengan baik. Hanya saja, dalam diskusi muncul kebutuhan akan kepastian transaksi baik kepastian membayar dan kepastian menyetor barang sesuai kontrak.

"Sehingga untuk mengamankan kontrak lelang tersebut, dibutuhkan lembaga penjaminan dan penyelesaian transaksi. Kemudian rencana ini disampaikan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Tak perlu pikir panjang, KBI siap mendukung rencana tersebut baik untuk pasar lelang spot maupun forward," tutur Yuli Edi.

Karena itu, Bappebti akhirnya menjadi sebagai fasilitator dan koordinator mempertemukan KBI dengan PT MKG untuk membahas penjaminan dan penyelesaian transaksi lelang. "Secara umum pembahasan tersebut berjalan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan cek fisik terhadap kekayaan dan harta yang dimiliki oleh PT MKG, termasuk pengecekan fisik 3 gudang untuk penerimaan dan penyerahan komoditi kopi yang akan di jual di pasar lelang."

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga sangat mendukung rencana PT MKG untuk menjadi Penyelenggara PLK. Diantara dukungan yang diberikan yaitu, dukungan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi PLK, termasuk pengembangan pasar dan pelaku pasar. "Pemda Aceh Tengah juga





Bappebti mengkaji peraturan tata tertib PLK Kopi Gayo.

mengusulkan pembangunan fisik untuk gedung pasar lelang yang lokasinya dekat dengan gudang SRG," jelas Yuli Edi.

Solusi

PT MKG optimis akan mampu menjadi Penyelenggara PLK Kopi Gayo. Pasalnya, menurut keterangan Direktur Utama, PT MKG, Indra Perwiryanto, kepada **Buletin Bappebti**, PT MKG dikelola secara profesional dan memiliki sumber daya manusia yang handal.

Untuk diketahui, pendirian PT MKG diinisiasi oleh dua grup usaha yang sudah cukup besar di bisnis kopi yaitu Koperasi Baitul Qiradh Baburayan dan CV. Aridalta Mandiri.

"Dengan dukungan dua grup usaha ini dan dukungan pemerintah setempat kami sangat yakin pengelolaan pasar lelang ini akan berjalan dengan baik, dan akan berdampak pada terbentuknya sistem tata niaga kopi yang lebih baik dimasa yang akan datang," tutur Indra.

Selama ini, lanjut Indra, tantangan yang masih dihadapi dalam sistem tata

niaga kopi adalah sulitnya mengakses pasar secara langsung. Untuk itu salah satu upaya pembenahan yang perlu dilakukan, yaitu mendekatkan petani dan pelaku usaha dengan gerbang pemasaran. "Mata rantai suplay yang panjang merupakan tantangan yang masih dihadapi oleh petani kopi selama ini," ungkapnya.

Melihat masalah tersebut, kata Indra, kehadiran PLK merupakan solusi strategis bagi petani kopi khususnya yang ada di daerah dataran tinggi Gayo dan Indonesia umumnya. "PT MKG sangat optimis pasar lelang akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini masih dihadapi oleh petani dan pelaku usaha kopi," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan beberapa program PT MKG sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Kopi Gayo. Diantaranya, mempersiapkan bahan kelengkapan administrasi dan instrumen lelang yang diperlukan, merekrut anggota untuk bergabung ke dalam sistem pasar lelang, mencari dan menemukan *potensial buyer*, serta mengumpulkan para produsen

yang ingin barangnya di lelang. "Dalam waktu dekat, lelang yang akan dilakukan adalah lelang spot," tutur Indra.

Selain itu, PT MKG dalam waktu dekat juga akan mengikuti sejumlah pelatihan dan mengirimkan para staf untuk belajar dan memperkuat pengetahuan tentang PLK.

Sedangkan untuk persiapan jangka panjang, dalam waktu tiga tahun ke depan, PT MKG juga akan mempersiapkan diri untuk memasuki sistem pelelangan *future*. "Dalam kurun waktu tersebut PT. Meukat akan terus berusaha meningkatkan *performance* dan melakukan evaluasi dan berinovasi," kata Indra optimis.

Singkatnya, dengan kehadiran PLK Kopi Gayo di Aceh, PT MKG menargetkan terjadinya perubahan pada sistem pemasaran kopi didataran tinggi Gayo yang menguntungkan petani. Salah satunya adalah dengan memperpendek mata rantai pemasaran untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Sinergi SRG

Penyelenggaraan PLK memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana pemasaran komoditas khususnya untuk komoditas agro, memperpendek mata rantai pemasaran, memberikan kepastian harga melalui pembentukan harga yang transparan, membangun dan memperluas jaringan usaha dan menjamin penyerahan komoditas.

Terlebih lagi apabila penyelenggaraan PLK dapat disinergikan dengan SRG. Sebagai informasi, di Takengon telah dibangun 2 gudang SRG (di Aceh Tengah dan Bener Meriah) dan telah mengimplementasikan SRG untuk Kopi Gayo, serta telah menerbitkan Resi Gudang dengan jumlah yang sangat signifikan.

"Untuk menjaga orisinal Kopi Gayo

dan masyarakat mendapat harga kopi yang transparan dan berkeadilan, maka penjualan Resi Gudang Kopi Gayo akan di dorong melalui pasar lelang. Sehingga sinergisitas antara SRG dan PLK akan terjadi di daerah ini," kata Yuli Edi Subagio

Tak hanya itu, secara bertahap, apabila kelak SRG - PLK berjalan dan bersinergi dengan baik, maka Bappebti akan mencoba mengajak bursa berjangka dan pelaku perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan pendekatan dengan para pelaku Kopi Gayo di Aceh. "Jadi, pelaku Kopi Gayo dapat menjual melalui bursa berjangka. Sehingga sinergisitas antara perdagangan berjangka, SRG dan PLK akan terwujud," tuturnya.

Sementara itu, Indra Perwiryanto berpendapat, pengintegrasian SRG ke dalam pengelolaan PLK tentunya akan

mempermudah dari segi efektifitas dan akan terjadi sentralisasi dari pengelolaan pasar lelang itu sendiri. "Kami juga mendorong para petani kopi dan pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG sebelum barangnya siap untuk di lelang," ujar Indra.

Selain dengan cara memanfaatkan SRG, PT MKG juga akan melaksanakan lelang kopi di gudang-gudang yang disepakati antara kedua belah pihak. Meski demikian, Indra mengungkapkan ada beberapa tantangan SRG yang masih di hadapi di Aceh. "Belum siapnya kelembagaan di daerah, seperti Pengelola Gudang dan Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang," tutup Indra Perwiryanto. ☘

Profil PT. Meukat Komuditi Gayo



PENDIRIAN PERUSAHAAN
PT. MEUKAT KOMUDITI GAYO adalah merupakan sebuah perusahaan lokal di A. Tengah berdiri pada tahun 2014 yang memfokuskan diri pada kegiatan jual beli produk-produk Agro unggulan yang ada di Provinsi Aceh. Salah satu produk unggulan yang menjadi fokus utama kami adalah Kopi Arabika Gayo.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Visi
Menjadi perusahaan trading Komuditi Agro di Provinsi Aceh yang berkualitas serta mampu memimpin pasar di Indonesia dengan reputasi global.
Misi
Menjadi Perusahaan yang memimpin dan dipercaya dalam menstabilkan harga produk pertanian dan perkebunan yang di produksi oleh masyarakat, dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul serta di saat yang sama terus meningkatkan kualitas produk yang bersertifikasi dalam dan luar negeri, melaksanakan tanggung jawab sosial kami terhadap lingkungan, dan memberikan profitabilitas/ hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan.

FASILITAS
Saat ini PT. MEUKAT KOMUDITI GAYO memiliki beberapa fasilitas diantaranya:
1. Perkantoran
2. Pergudangan
3. Unit processing kopi
4. Area Jemur

PRODUK
Kopi Arabika Gayo saat ini sudah mendapat sertifikat Indikasi Geografis. PT. MEUKAT KOMUDITI GAYO adalah salah satu anggota dari MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo) Produk Kami juga sudah memiliki Sertifikat Organic dan Fairtrade

KEGIATAN
Beberapa kegiatan tahap awal yang saat ini sudah dijalankan oleh perusahaan diantaranya adalah:
1. Peningkatan kapasitas direksi dan karyawan melalui serangkaian training.
2. Melakukan sosialisasi bersama anggota koperasi

produsen kopi yang menjadi mitra.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan promosi produk kopi di even Nasional dan International.
4. Menjadi mitra pemerintah sebagai pengelola pasar lelang komoditi di Prov. Aceh.

HUBUNGI KAMI
PT. MEUKAT KOMUDITI GAYO
Alamat : Jalan Sukarno Hatta Kp. Kebet Kec. Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh – Indonesia
Tlp/Fax : +6264324113
Email : meukatkomuditi@yahoo.com
CP : Indra Perwiryanto [+6281360043044]
Hadi Syahrizal [+628126949049]
Iwanitosa Putra [+628116096107]

KEMITRAAN
1. KOPERASI BAITUL QIRADH BABURAYAN (Komisaris)
2. CV. ARIDALTA MANDIRI (Komisaris)
3. KOPERASI ARISARINA (1500 anggota petani Kopi)
4. CV. ATEUTAMOUN (1800 petani Kopi Organic)



Nr	Type Of Product
1	Gayo Arabica Grade I (Conventional)
2	Gayo Arabica Grade I (Certifications) FTO
3	Gayo Arabica (Fully Washed)
4	Longberry (Specialty)
5	Peaberry (Specialty)
6	Single Farmer (Specialty)

PRIORITAS KAMI
1. Kualitas dan jual beli yang berkeadilan (Hanya mengutamakan kopi yang berkualitas dan senantiasa membayar petani dengan harga yang pantas)
2. Layak dan berkelanjutan (sustainable) (Mengalakkan produk yang organik serta menciptakan sistem bercocok tanam yang berkelanjutan).
3. Tanggung jawab sosial (akan menggunakan 10% pendapatan untuk mendukung kelestarian lingkungan)
4. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat/petani kopi melalui serangkaian training yang berkaitan dengan cara-cara bercocok tanam dan peningkatan kualitas produksi kopi.





Tantangan PBK di Era MEA

Redaksi; dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Indonesia akan memasuki era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN, tepatnya 31 Desember 2015. Dalam kaitan itu, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, menyampaikan jawaban atas sorotan atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan media massa. Berikut ini jawaban Kepala Bappebti yang disarikan **Buletin Bappebti;**

Tanya (T); Sejauh mana kesiapan industri perdagangan berjangka dalam rangka perdagangan bebas ASEAN?

Jawab (J); Industri Perdagangan Berjangka pada masa berlakunya perdagangan bebas ASEAN atau disebut juga Masyarakat Ekonomi ASEAN, belum bisa dibuka untuk dimasuki investor

asing. Karena jika dilihat dari peraturan bidang PBK yang berlaku saat ini, PBK masih bersifat nasional dan masih terdapat peraturan yang membatasi keterlibatan pelaku/perusahaan asing dalam perdagangan berjangka secara keseluruhan di Indonesia. Namun, untuk kerjasama antar otoritas dan SRO tetap bisa dilaksanakan sebagai upaya memajukan industri PBK di tanah air.

Peraturan yang membatasi pemodal asing di PBK diatur dalam SK Kepala Bappebti No. 76/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Larangan Bagi Pialang Berjangka Penanaman Modal Asing Untuk Bertransaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2014, tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di

Bidang Penanaman Modal. Kebijakan yang mengatur larangan penanaman modal asing sebagai Pialang Berjangka Peserta SPA, telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan PBK, dan agar Pialang Berjangka lebih terdorong untuk melakukan transaksi Multilateral.

Hal ini ditandai dengan banyaknya konsultasi terkait dengan keinginan dari beberapa Pemodal Asing yang berminat untuk mendirikan perusahaan Pialang Berjangka untuk melaksanakan transaksi SPA harus mengurungkan niatnya. Namun demikian Bappebti tetap waspada dan melakukan pengawasan, apabila terdapat modus Pemodal Asing yang menggunakan WNI atau badan

hukum Indonesia untuk melaksanakan SPA, antara lain dengan mewajibkan seluruh pemegang saham, pengurus, dan pengendali perusahaan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Bappebti juga melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen pada saat perusahaan mengajukan permohonan izin atau perubahan pengurus. Selain itu pada saat pengawasan dan audit di lapangan, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa aturan dipatuhi oleh para pelaku SPA. Dalam hal di kemudian hari persyaratan tersebut ternyata dilanggar, maka sesuai ketentuan Bappebti berwenang mencabut izin Pialang Berjangka dimaksud, karena telah melaporkan persyaratan perizinan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

T: Apa kebijakan Kepala Bappebti terutama dalam peningkatan transaksi multilateral dan peningkatan integritas transaksi SPA?

J: Untuk peningkatan transaksi multilateral, Bappebti telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan kemudahan maupun melalui berbagai kebijakan antara lain: Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Tentang Penggerak Pasar (Market Maker) Dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka Di Bursa Berjangka; Melakukan kajian terhadap Komoditi ataupun Kontrak Berjangka yang prospektif dan diinginkan oleh pelaku pasar, seperti Komoditi Teh dan Surat Utang Negara, termasuk melakukan penyempurnaan Kontrak Berjangka yang telah diperdagangkan sehingga menarik pelaku pasar dan meningkatkan likuiditas (juga termasuk ukuran kontrak yang lebih terjangkau); Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line; Kewajiban adanya desk Komoditi pada Pialang Berjangka; Mendorong dibuatnya "Pojoek Bursa Berjangka" pada kampus-kampus, sebagai langkah edukasi kepada para akademisi.

Sedangkan untuk peningkatan

integritas SPA, Bappebti telah melakukan dengan pengetatan kebijakan maupun penegakan hukum yang tegas antara lain; Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 Tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; Melakukan revitalisasi dan pengkajian terhadap pelaksanaan dari Perka Nomor 79/BAPPEBTI/Per/01/2010, terutama terkait dengan Sistem Perdagangan dan Sistem Pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan kewajaran dan transparansi transaksi dapat terjadi; Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 115/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Ketentuan Dana Kompensasi; Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 116/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Ketentuan Larangan Memberikan Pinjaman Kepada Pihak Terafiliasi di bidang PBK; Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 117/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Ketentuan Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi Di Bidang PBK; Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 119/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Ketentuan Kewajiban Pelaporan dan MBD bagi Pialang Berjangka Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/Per/03/2015 Tentang Ketentuan Pengelolaan Rekening Terpisah Pialang Berjangka

Selain menerbitkan beberapa kebijakan Bappebti juga melakukan penegakan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi administratif mulai Peringatan, Pembekuan sampai dengan Pencabutan Izin perusahaan serta mengenakan sanksi denda administratif apabila Pelaku tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangan.

T. Terkait dengan semakin maraknya perdagangan transaksi SPA secara online yang berdampak bagi sebagian besar Pialang Berjangka. Bagaimana langkah Bappebti untuk mengawasi perkembangan transaksi SPA Online di

luar bursa?

J. Terkait dengan hal tersebut Bappebti telah menjadi Anggota Task Force WASPADA INVESTASI; dan Anggota Tim Panel Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN). Selain itu Bappebti juga telah tergabung dalam Satgas Waspada Investasi OJK, bersama dengan kepolisian, kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Informasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, dan BKPM, yang merupakan suatu *TASK FORCE* untuk mencegah dan mengatasi investasi bodong. Terhadap setiap informasi yang didapatkan Bappebti baik dari penelusuran ataupun informasi dari masyarakat, Bappebti telah melakukan identifikasi awal, dan apabila berdasarkan hasil identifikasi perusahaan dimaksud tidak terkait dengan kegiatan di bidang PBK, maka Bappebti menyampaikan hasil identifikasi dimaksud kepada Satgas Waspada investasi untuk dapat ditindaklanjuti.

Terkait kegiatan transaksi SPA Online oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin Bappebti, dilakukan langkah-langkah antara lain: melakukan pembenahan terkait sistem perdagangan yang saat ini digunakan oleh pelaku SPA, seiring dengan pembenahan sistem perdagangan tersebut di atas, Bappebti juga akan membangun sistem pengawasan transaksi SPA yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pengawasan, memastikan penerapan *Know Your Employee* dan meningkatkan kualitas implementasi serta evaluasi penerapan *Know Your Customer* kepada Pelaku usaha sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh pegawai perusahaannya sendiri, meningkatkan pemahaman di bidang SPA kepada masyarakat penerapan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan di bidang PBK.



Program Otentik SRG di Kalangan Akademik

Percepatan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG), Bappebti melibatkan peran aktif kalangan akademisi. Diharapkan kaum intelektual itu dapat membuat inovasi baru sekaligus menjadi motor penggerak pengembangan SRG di tanah air.

Sejumlah terobosan baru untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG terus dilakukan Bappebti. Salah satunya yang terbaru yakni, Bappebti menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian, pengajaran dan juga pelaksanaan SRG di lapangan. Seperti pada Kamis, 26 November 2015 lalu, Bappebti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Lampung- Unila. MoU itu ditandatangani oleh Kepala Bappebti, Sutriyono Edi dan Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin, di Auditorium Fakultas Pertanian Unila.

Melalui kerjasama ini, Sutriyono Edi, mengatakan, "SRG akan menjadi bahan pembahasan dalam mata kuliah pokok di Universitas Lampung." Tidak hanya

itu, tambahnya, SRG juga nantinya akan menjadi materi untuk disampaikan kepada para petani pada saat mahasiswa Unila melaksana tugas KKN- Kuliah Kerja Nyata.

Dengan demikian, SRG telah menjadi bagian dari program-program akademik yang dimiliki oleh Unila. Misalnya seperti penyelenggaraan KKN tematik, atau penelitian, pengembangan atau pengabdian di masyarakat.

"MoU ini membuktikan komitmen pemerintah dan kalangan akademisi dalam percepatan implementasi SRG untuk memberikan solusi masalah pangan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil dan menengah," ucap Sutriyono.

Dia juga berharap, kerjasama tersebut dapat mendorong pertumbuhan SRG

lebih cepat, seiring dengan semangat Unila dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi wiraswasta. "SRG ini menjadi pola bisnis yang menjanjikan, karena SRG mengintegrasikan dari hulu sampai hilir. Kita berharap mahasiswa Unila nantinya bisa menjadi pengusaha SRG," tuturnya.

Sementara itu, Hasriadi Mat Akin, menyambut baik atas kerjasama tersebut. Menurutnya, Lampung merupakan salah satu gudang komoditi di Indonesia. Menurut Hasriadi, Lampung merupakan lumbung padi dan hasilnya sudah surplus. Selain itu Lampung merupakan penghasil lada dan penghasil gula nomor satu di Asia Tenggara. Lampung juga tercatat sebagai salah satu produsen singkong terbesar di Indonesia.

"Kerjasama ini merupakan potensi



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi menandatangani MoU dengan Rektor UNILA dan memberi sambutan dalam sosialisasi SRG di FEB UNILA.



besar untuk pengembangan Sistem Resi Gudang, khususnya di Provinsi Lampung," ungkap Hasriadi.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mendorong sektor agribisnis melalui SRG. "Petani harus kita didik untuk menghasilkan komoditi yang memenuhi standar untuk dapat disimpan di Gudang SRG," tambahnya.

Sosialisasi SRG

Selain melakukan MoU, di tempat yang sama, Bappebti juga menggelar sosialisasi SRG. Acara sosialisasi itu dihadiri sekitar 150 peserta. Adapun narasumbernya yaitu Kepala Bappebti, Sutriyono Edi; Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen, Djunaedi; Guru Besar Univ Lampung, Bustanul Arifin; dan Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Indrajaya.

Dalam pemaparan materinya, Sutriyono Edi mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan solusi bagi persoalan pangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin intensifnya upaya yang dilakukan Bappebti dalam mengembangkan operasional SRG. "SRG dapat menjadi solusi persoalan pangan nasional."

SRG, lanjut Sutriyono, dapat mendorong stabilisasi harga dengan memberikan kepastian kualitas dan kuantitas komoditas barang yang disimpan, mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan), mendapatkan pembiayaan bunga rendah dengan cara tepat yang lebih mudah, serta mendorong berusaha secara kelompok sehingga meningkatkan

posisi tawar.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, Sutriyono menjelaskan, SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrik) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang.

Secara kumulatif sampai 17 November 2015, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 2.125 resi dengan total volume komoditas sebanyak 80.254,67 ton (68.077,96 ton gabah; 6.499,22 ton beras; 5.101,07 ton jagung; 153,27 ton kopi; 420 ton rumput laut; dan 3,14 ton kakao) atau total nilai komoditi mencapai sebesar Rp 422,19 miliar.

Sementara itu, sejak diluncurkan pada 2008, penerbitan resi gudang telah dilakukan di 16 provinsi, meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Bali, dan Sulawesi Tenggara.

Adapun Guru Besar Unila, Prof. Bustanul Arifin dalam pemaparan materinya memberi penjelasan bahwa SRG sebenarnya bukan hal baru di negara-negara lain. Di Amerika, Eropa dan bahkan negara-negara Afrika sudah

menerapkan SRG. "Jadi keterlaluannya kalau kita Indonesia tidak menerapkan Sistem Resi Gudang," katanya

Tujuh Gudang

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan. Dari 10 komoditas Sistem Resi Gudang, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/02/2013 yaitu gabah, beras, jagung, kakao, kopi, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam, Provinsi Lampung merupakan sentra produksi untuk Gabah, Beras, Jagung, Kakao, Kopi, dan Lada.

Berdasarkan data statistik, produksi Gabah Kering di Lampung pada tahun 2013 mencapai 3,21 juta ton sedangkan produksi jagung 1,76 juta ton. Dengan potensi sumber daya alam tersebut, Kementerian Perdagangan telah membangun sebanyak tujuh gudang di Provinsi Lampung. Dua gudang berlokasi di Lampung Selatan dan masing-masing satu gudang di Pesisir Barat, di Lampung Tengah, di Lampung Timur, di Tanggamus dan di Tulang Bawang. Ketujuh gudang ini masing-masing berkapasitas 1.500 ton gabah, beras, dan jagung.

"Diharapkan dengan telah dibangunnya gudang-gudang SRG tersebut dapat membantu menghidupkan perekonomian daerah, mendorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah dan sebagai sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien," kata Sutriyono.



Komoditi Rumput Laut Masuk 'Radar' Bursa Berjangka dan SRG

Komoditi rumput laut Indonesia semakin mencuri perhatian pasar baik di dalam negeri maupun internasional. Dari US\$ 1.09 miliar permintaan dunia, Indonesia baru bisa memasok 26,50 %. Rendahnya kontribusi pasar rumput laut Indonesia itu dikarenakan fluktuasi harga yang menekan petani.

Sebagai negara kepulauan dengan luas pantai lebih dari 81.000 km, membuat Indonesia menjadi salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Namun, potensi besar itu belum membawa dampak positif pada perekonomian daerah sentra produksi. Meski demikian, rumput laut Indonesia tetap diperhitungkan di mancanegara. Hal itu dibuktikan dengan berkumpulnya sejumlah pemangku kepentingan baik dari dalam negeri maupun internasional dalam *The 3rd Indonesia Seaweed Forum*, pada 11-15 November 2015, lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian forum ilmiah, pameran, dan forum bisnis komoditi rumput laut.

Pada forum rumput laut Indonesia yang ke tiga kalinya itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Jakarta Futures Exchange- JFX, turut dalam jajaran narasumber yang dihadiri

delegasi dari 15 negara. Masing-masing Jepang, Italia, Australia, Maroko, Vietnam, Malaysia, China, Philipina, Korea Selatan, India, Argentina, Spanyol, Swiss, Prancis dan Jerman.

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam paparannya mengatakan, saat ini Bappebti masih mengkaji rumput laut masuk sebagai kontrak baru transaksi pasar fisik dan perdagangan berjangka. "Pasalnya, komoditas rumput laut harganya cenderung fluktuatif dari masa ke masa. Karena itu, dengan mekanisme pasar fisik dan perdagangan berjangka akan melindungi nelayan atau petani rumput laut sehingga memiliki kepastian pasar," katanya.

Ditambahkan Sutriyono Edi, untuk mematangkan rencana tersebut pihaknya telah melakukan peninjauan ke sentra produksi rumput laut di Sulawesi Selatan dan menilai komoditas tersebut layak untuk diperdagangkan. "Karena itu kami sudah mengajak sejumlah

instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian, untuk mematangkan rencana tersebut. Sehingga dalam waktu tak lama lagi komoditas rumput laut sudah bisa masuk dalam transaksi pasar fisik serta perdagangan berjangka," jelas Sutriyono Edi.

Pasar Fisik

Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, dalam keterangannya mengatakan, keikutsertaan JFX pada forum rumput laut Indonesia itu dikarenakan pihaknya banyak mendapat informasi mengenai komoditi rumput laut dan sekaligus mengeksplorasi kemampuan Indonesia sebagai salah satu industri rumput laut terkemuka di dunia.

"Potensi rumput laut sebagai salah satu produk kontrak berjangka sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut terbesar di dunia dan memiliki peluang sangat besar

di pasar ekspor," kata Paulus.

Adanya potensi itu dikarenakan fluktuasi harga rumput laut sangat rentan. Hal itulah yang membuat komoditi rumput laut layak diperdagangkan di bursa berjangka, tambahnya.

"Kami akan terus mengkaji rumput laut dari berbagai elemen, supaya dapat diperdagangkan di JFX pada tahun 2016 mendatang dan membawa manfaat bagi para pelakunya, terutama petani rumput laut. Sehingga kedepannya juga dapat menjadi andalan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir," terang Paulus.

Sebab itu, Paulus pun berharap melalui forum rumput laut Indonesia tersebut sektor-sektor industri terkait yang hadir bisa menemukan rumusan yang tepat untuk membuat pasar fisik terorganisir sebagai langkah awal sebelum kontrak berjangka yang diperdagangkan di JFX.

Di pihak lain, Ketua Panitia Forum Rumput Laut Indonesia, Arman Arfah, mengatakan, kegiatan itu sekurangnya dihadiri 200 orang peserta. "Para peserta itu berasal dari kalangan pelaku usaha, akademisi, unsur pemerintah dan kalangan industri," tambahnya.

"Tujuan diselenggarakannya forum rumput laut ini agar kita bisa mengeksplorasi manfaat rumput laut sebagai produk-produk makanan, kesehatan, kecantikan, energi dan produk pendukung industri lainnya," jelas Arman.

Lebih jauh dikatakan Arman, forum ini menjadi kesempatan tukar menukar dan pembaruan informasi, pengalaman dan presentasi hasil riset dan pengembangan rumput laut. Selama pelaksanaan forum ini, berbagai kegiatan akan digelar mulai dari sarasehan nasional masyarakat pesisir. Acara ini digelar di Maraja Ballroom Sahid Hotel. Sarasehan ini menghadirkan para gabungan kelompok tani wilayah pesisir seluruh Indonesia.

"Puncak acara dari forum ini adalah bertemunya para pebisnis internasional yang akan melakukan transaksi dan mencari mitra dagang di dalam negeri. Sehingga dengan berlangsungnya forum

ini, semakin terbuka pasar ekspor rumput laut Indonesia di mancanegara," imbuh Amran Arfah.

SRG Rumput Laut

Komoditi rumput laut sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia juga mendapat perhatian serius Kementerian Kelautan dan Perikanan-KKP. Salah satu bentuk perhatian KKP yakni adanya pembatasan jumlah ekspor yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar negara-negara sasaran ekspor di dunia.

Di samping itu, KKP juga akan menyusun road map dan tata niaga rumput laut yang menyertakan pemangku kepentingan rumput laut dari hulu sampai hilir. Sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut.

Terkait itu, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini, mengatakan, KKP bersama kementerian terkait juga akan memanfaatkan Sistem Resi Gudang- SRG sebagai salah satu manfaat instrumen itu dapat menjadi penyangga harga produk rumput laut di masyarakat. "Sehingga SRG akan membantu menyerap rumput laut hasil budidaya di saat harga pasar sedang rendah," kata Susi Pudjiastuti.

Berdasarkan data KKP, potensi lahan rumput laut yang dimiliki Indonesia mencapai 12,1 juta hektar, dan baru dimanfaatkan sekitar 2,68 % atau 352.825,12 ha. Sementara produksi rumput laut basah Indonesia sebesar 9,2 juta ton pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,2 juta ton. Dari sisi ekspor, volume ekspor rumput laut Indonesia tahun 2013 yakni sebesar 181.924 ton dengan nilai US\$ 209,7 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 206.452 ton dengan nilai US\$ 279,5 juta. Sementara itu, dari data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan rumput laut dunia mencapai US\$ 1.09 miliar per tahun. Dari nilai permintaan dunia itu, Indonesia baru bisa memasok 26,50 %.



Pertemuan Teknis Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti mengadakan Pertemuan Teknis Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang di Hotel Acacia, di Jakarta, 25 November 2015. Peserta yang hadir pada Pertemuan Teknis Persiapan Revitalisasi Pasar terdiri dari perwakilan 8 dinas yang membidangi perdagangan provinsi yang sedang menyiapkan Revitalisasi Pasar Lelang. Di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga hadir para calon Penyelenggara Pasar Lelang Swasta yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Provinsi. Pertemuan Teknis Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi antara Bappebti dengan Dinas untuk mempersiapkan Revitalisasi Pasar Lelang di 8 daerah. Melalui Pertemuan Teknis ini akan diketahui perkembangan masing – masing daerah sehingga dapat dirumuskan *action plan* dalam rangka meletakkan dasar – dasar revitalisasi.



Evaluasi Integritas Sistem Perdagangan Alternatif

Kepala Bappebti Sutriono Edi membuka acara *Focus Group Discussion* (FGD) tahap I tentang Evaluasi Integritas Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang diadakan oleh PT Treconsulmas di Jakarta, Selasa (3/11). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Bappebti Marthin, Kepala Biro Perniagaan Pantas Lumban Batu, Kepala Biro Analisis Pasar Mardjoko dan Sekretaris Jenderal Gunaryo. Kegiatan ini merupakan tahap awal Evaluasi Integritas Perdagangan SPA, di mana berbagai masukan dari seluruh unit Bappebti disampaikan. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data dan informasi dari seluruh pelaku usaha meliputi Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Pedagang Penyelenggara SPA, dan Nasabah. Bappebti sebagai regulator di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perhatian khusus terhadap SPA agar terciptanya perdagangan yang baik, transparan, dan melindungi seluruh pihak dari setiap tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan 3 tahap dan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik untuk meningkatkan integritas SPA. FGD kedua rencananya akan dilakukan pada akhir November 2015.



Penyegaran PPNS di Bidang PBK dan SRG

Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi oleh Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Hariyati membuka acara Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG), di Auditorium Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), Jakarta, Senin (9/11). Dalam pengarahannya, Sutriono menegaskan, PPNS harus bertindak tegas namun tetap hati-hati. Kemampuan penyidik harus terus ditingkatkan, begitu juga dengan peraturannya. PPNS harus bisa berfungsi melakukan pencegahan dan penindakan dengan



terus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS menghadapi tantangan yang besar mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Lebih lanjut, Sutriono mengungkapkan, kehadiran PPNS saat ini dan ke depan sangat penting sebagai bagian 'menghadirkan pemerintah' di tengah masyarakat dalam menangani berbagai penyimpangan dan kejahatan di bidang PBK dan SRG. Acara Penyegaran PPNS dihadiri oleh 40 orang peserta dari Bappebti dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatera Utara, dll.

Pelatihan Teknis Penyuluh Lapangan SRG

Kepala Bappebti Sutriono Edi memberikan sambutan sekaligus membuka acara Pelatihan Teknis (Latnis) Penyuluh Lapangan Sistem Resi Gudang (SRG) di Jakarta, Selasa (17/11). Dalam sambutannya, dia meminta para Tenaga Penyuluh Lapangan SRG dapat berinteraksi secara intensif dengan petani. Sebab, peranan Penyuluh Lapangan sangat penting untuk menyampaikan pengetahuan tentang SRG kepada para petani/kelompok tani maupun koperasi dan UKM melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi maupun edukasi secara berkesinambungan di daerah sentra produksi. Pelatihan ini diselenggarakan selama empat hari, dimulai



pada tanggal 17 s.d 20 November 2015. Adapun pesertanya merupakan perwakilan dari dinas yang membidangi perdagangan serta penyuluh pertanian/ kehutanan/ perikanan dari 8 daerah, yaitu Kabupaten Pidie, Banyuasin, Sambas, Nunukan, Karo, Langkat, Madiun dan Bantul. Adapun total jumlah pesertanya sebanyak 24 orang. Sedangkan tenaga pengajar dalam pelatihan ini berasal dari Bappebti dan instansi-instansiterkaitdenganpelaksanaan SRG. Di antaranya, Kementerian Pertanian, PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero), UB Jastasma BULOG, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT. Jasa Asuransi Indonesia, Dinas Perindag Kabupaten Barito Kuala, Dinas Perindag Kabupaten Cianjur dan Koperasi Niaga Mukti Kabupaten Cianjur.

RG Kopi Aceh Tembus Rp 21 miliar

Kiprah Sistem Resi Gudang- SRG di tanah air makin menunjukkan manfaatnya bagi petani untuk memperoleh pembiayaan murah di saat harga di pasaran yang cenderung melemah.

Hal itu dibuktikan dengan terbitnya sebanyak 11 Resi Gudang kopi di Kabupaten Aceh Tengah, pada akhir bulan November 2015, lalu. Dari 11 Resi Gudang kopi tersebut, tersimpan sebanyak 360 ton kopi jenis arabika dan dengan nilai sebesar Rp 21,28 miliar. Demikian antara lain dikatakan Kepala Biro Pasar Fisik, Bappebti, Retno Rukmawati kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja SRG di Kab. Aceh Tengah. Karena ini kali pertama di Indonesia nilai Resi Gudang kopi menembus Rp 21,28 miliar. Meski demikian, kami tetap mengingatkan Pemda Aceh Tengah, agar kinerja yang sudah memuaskan itu dapat terus berlanjut di masa mendatang," kata Retno, optimis.

Sebab itu, kami pun berharap prestasi Kab. Aceh Tengah itu dapat diikuti daerah lain yang telah memiliki gudang SRG, tambahnya. "Karena kami yakin dengan terbitnya Resi Gudang kopi itu akan berdampak positif pada perekonomian daerah."



Lebih jauh dijelaskan Retno Rukmawati, kopi arabika sebanyak 360 ton itu dimiliki sebanyak 8 Gapoktan. Masing-masing, Gapoktan Ketiara Queen, Ketiara Gayo, Bunge Kemang, Tunas Mude, Ulen Reduk, Bintang Kejora, Megah Raya dan Gapoktan Mawar Berseri. "Dari sebanyak 8 Gapoktan itu jumlah kopi yang dimiliki bervariasi, ada yang sebanyak 80 ton, 40 ton dan 20 ton," katanya.

"Dari informasi yang kami peroleh, pembiayaan Resi Gudang kopi tersebut dilakukan oleh Bank BRI Cabang Takengon. Jumlah pembiayaannya mencapai Rp 12,12 miliar," imbuh Retno Rukmawati.

PT Bimasakti Berjangka Kembali Beroperasi



Setelah mendapat sanksi pembekuan izin operasional dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti pada 19 Mei 2015, lalu, PT Bimasakti Berjangka berupaya memperbaiki dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Atas upaya tersebut, Bappebti pada 4 Desember 2015 kembali mencairkan izin Bimasakti dan dapat beroperasi kembali seperti sedia kala.

Pencairan izin Bimasakti yang dilakukan Bappebti itu berdasarkan rekomendasi dari Jakarta Futures Exchange- JFX yang mencairkan pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa- SPAB dengan No. L/JFX/DIR-12-15/840, tertanggal 4 Desember 2015. Dalam pertimbangan JFX, Bimasakti dinyatakan telah memenuhi persyaratan Modal Bersih Disesuaikan- MBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Namun demikian, dalam keterangan Kepala Biro Hukum, Bappebti, Sri Haryati, mengatakan, pencairan pembekuan kegiatan usaha Bimasakti tidak menghilangkan atau menghapus tanggungjawab perusahaan apabila terdapat tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.

"Jadi, jika perusahaan saat beroperasi dan dalam masa pembekuan izin memiliki pertanggungjawaban pada pihak nasabah, tetap harus memenuhi kewajibannya. Tetapi dengan adanya rekomendasi dari JFX, maka Bappebti memiliki keyakinan bahwa perusahaan sudah siap dan dapat beroperasi kembali," kata Sri Haryati.

Semester II 2016 JFX Luncurkan Produk Syariah

Inovasi perdagangan berjangka komoditi yang akan dilakukan Jakarta Futures Exchange- JFX di tahun 2016 antara lain yakni diversifikasi produk dengan memperdagangkan kontrak berjangka syariah. Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, kepada **Buletin Bappebti**, dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kendala berarti, paling lama semester II 2016 kontrak berjangka syariah siap diluncurkan.

"Prinsipnya kami menghendaki lebih cepat lebih baik. Kalau sampai pada triwulan pertama persiapan sudah matang, mungkin di bulan April 2016 akan siap diluncurkan. Tetapi kalau masih ada yang belum beres, paling lama semester II JFX sudah memperdagangkan kontrak berjangka syariah," jelas Paulus.

"Posisi saat ini, kami tinggal membutuhkan persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan itu sangat perlu karena perdagangan berjangka syariah melibatkan perbankan syariah," tutur Paulus.

Ditambahkan Paulus, kalau dengan perbankan syariah kami sudah intens menjalin komunikasi, seperti ke Bank Syariah Mandiri, Bank Muammalat, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Selain itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah para pelaku komoditi yang nantinya akan menjadi *underlying asset* perdagangan syariah.



"Nantinya, komoditas yang akan dijadikan *underlying asset* kontrak berjangka syariah adalah *crude palm oil*- CPO, kopi, rumput laut, dan kacang mede. Dan untuk dapat dijadikan *underlying asset*, kami juga sudah meminta persetujuan dari Bappebti," papar Paulus.

Lebih jauh dikatakan Paulus, perdagangan berjangka syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi syariah di Indonesia. "Karena belakangan ini diketahui perbankan syariah mengalami penurunan likuiditas, jadi perdagangan berjangka syariah ini merupakan solusi bagi perbankan syariah untuk meningkatkan likuiditasnya."

Transaksi Rupiah-Renminbi Untungkan Indonesia



Menyebut Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, mengatakan, transaksi langsung rupiah dengan renminbi- RMB bisa menguntungkan dunia usaha Indonesia. Salah satunya, tambah Thomas, RMB bisa digunakan sebagai "alat" untuk memancing investasi Tiongkok ke Indonesia. Karena, transaksi langsung dari rupiah ke RMB akan memperbesar simpanan rupiah di kas Tiongkok. Hal itu dikatakan Thomas Lembong terkait dengan adanya penandatanganan perjanjian *bilateral currency swap arrangement*- BCSA yang disepakati pada 1 Oktober 2013 silam. Dalam kesepakatan itu, Indonesia mendorong penggunaan mata uang selain dolar AS dalam perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

"Mereka dapat dipastikan akan pegang lebih banyak rupiah, yang dapat digunakan untuk kepentingan investasi atau perdagangan dan impor komoditas. Karena tidak mungkin mereka pakai rupiah untuk impor dari Amerika," ujar Thomas dalam sebuah kesempatan baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Thomas, selama ini hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok selalu mengalami defisit berkisar US\$ 14 miliar per tahun. Namun karena Tiongkok akan memegang rupiah dalam jumlah besar, maka mereka akan investasi di Indonesia. Dan hal ini akan dapat menutupi defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

Dalam kaitan itu, dari kaca mata ekonom Yanuar Rizky, mengatakan, dengan perjanjian BCSA itu bisa menjadi peluang bagi Indonesia jika sungguh-sungguh dijalankan. "Tiongkok akan langsung menggunakan rupiah untuk impor komoditas dari Indonesia, itu artinya rupiah akan terserap di kalangan pengusaha Tiongkok."

Tetapi risikonya, tambah Yanuar, mereka akan minta diskon dari harga komoditas yang selama ini diperdagangkan dengan mata uang dolar AS. "Di sisi lain, kita tidak memiliki jaminan nilai RMB sepekerja dolar AS. Karena itu, mekanisme *hedging* RMB sangat penting bagi pengusaha di masa mendatang."



Pasar Karet Regional Jaga Pasokan dan Harga

Negara-negara produsen karet dunia berkomitmen menjaga pasokan agar seimbang dengan permintaan dunia terhadap karet alam. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi dalam rangkaian pertemuan tingkat menteri terkait karet, *International Tripartite Rubber Council (ITRC) 2015*, di Jakarta.

"Seiring dengan rendahnya harga, produksi di ketiga negara mengalami penurunan. Sebagai sesama negara produsen karet alam yang menguasai 67% pangsa produksi global, Indonesia, Thailand, dan Malaysia berkomitmen menjaga pasokan dan permintaan karet tetap seimbang," kata Bachrul di sela-sela pertemuan tingkat pejabat senior ITRC, baru-baru ini.

Menurut Bachrul, dengan turunnya produksi, pasokan karet alam akan berkurang. Produksi Indonesia yang tahun ini sekitar 3,1 juta ton juga akan memengaruhi stok karet alam global.

"Terobosan-terobosan inovatif terus dilakukan agar dapat memenuhi target peningkatan konsumsi domestik sebesar 10% per tahun. Kalau selama ini karet alam digunakan sebagai bahan dasar ban kendaraan, nantinya akan semakin banyak produk berbasis karet alam seperti *dock fender*, campuran aspal, komponen pembuatan pintu air sampai ban pesawat terbang," jelasnya.

Selain itu, tahun depan ITRC akan merealisasikan pasar karet regional. "Persiapan peluncuran pasar karet regional memasuki tahap akhir. Tahun depan, pematangan pasar fisik akan dimulai di masing-masing negara. Dengan adanya pasar karet regional ini, penentuan harga akan lebih transparan dan harga yang terbentuk mencerminkan situasi dan kondisi pasar karet itu sendiri," ungkap Bachrul. 

GAPKI Prediksi Harga CPO Menguat di 2016

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan harga minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) pada tahun 2016 bakal naik dibandingkan tahun 2015. "Prospek harga CPO 2016 di kisaran US\$ 580-600 per ton atau 2.450-2.550 ringgit Malaysia per ton," ujar Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan, belum lama ini.

Berbagai faktor yang akan memengaruhi harga CPO 2016. Di antaranya, implementasi program biodiesel, harga minyak dunia,

Investor Perancis Minat Kembangkan Kakao Sulut

Pengusaha asal Perancis berminat mengembangkan komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kakao masyarakat Perancis yang cukup tinggi. Selain itu, komoditas kakao di Sulut dinilai cukup potensial dan memiliki kualitas produk yang cukup tinggi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Jenny Karouw, di Manado, belum lama ini. "Permintaan kakao yakni coklat di Perancis sangat tinggi, sedangkan negara tersebut tidak memroduksinya," jelas Jenny.

Selama ini, Perancis tidak memiliki perkebunan kakao dan hanya membeli dari negara luar. Sedangkan Sulut memiliki perkebunan kakao yang sangat luas khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondouw.

Dia menambahkan, minat Perancis untuk mengembangkan komoditas kakao di Sulut, disambut baik oleh pemerintah dan langsung difasilitasi. "Dengan masuknya Perancis, maka kakao Sulut bisa merambah pasar ekspor ke Eropa," katanya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani kakao di Sulut.

Dia juga bilang, Perancis sudah menjadi tujuan ekspor beberapa komoditas Sulut seperti tepung kelapa, ikan beku, biji pala dan fuli pala. "Diharapkan komoditas kakao asal Sulut juga bisa diekspor ke negara tersebut, sehingga mampu meningkatkan devisa bagi negara," pungkasnya. 

kondisi El Nino, dan implementasi Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (*Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC*).

Sementara itu, produksi CPO pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai 33 juta ton-35 juta ton. Angkanya tak terlalu banyak berubah dibandingkan proyeksi produksi tahun 2015. Menurut Fadhil, dari total produksi 2015, sekitar 23-24 juta ton minyak sawit akan diekspor. Sementara untuk keperluan dalam negeri sekitar 13 juta-13,5 juta ton. 

Futures broker's violation numbers is decreasing

Coftra, until 18th of November has issued 15 sanctions for futures broker. The sanctions are vary from written sanction up until revocation of business license. In 2014 period, Coftra recorded 22 sanctions that received by futures brokers firm.

"Until last 18th of November, there were 15 sanctions that we have issued to futures brokers. They were either written sanction until revocation of business license," Sri Hariyati, Coftra's Head of Legal Bureau said recently in media press conference in Bandung, West Java.

The sanction that was released by Coftra, as added by Sri Haryati, was because of some violations that have been done

by futures broker firm. One of the violations is the misuse of customer's separate fund.

"Compare with last year, this year sanction is decreasing whereas in the previous year Coftra issued 22 sanctions for the futures broker. Amongst those 22 sanctions, Coftra revoked 5 futures brokers' license," She said.

This year sanctions that have been received by futures broker firm were mainly written warning sanction for 9 futures brokers. Then 5 sanctions of business' suspension, Sri Hariyati continued.

"From Coftra's collaboration with Information & Communication Ministry, we have blocked 33 illegal websites that offers futures trading investment," Sri Hariyati's emphasized. 

RFB will boost physical coffee market.

Rifan Financindo Berjangka Pty Ltd (RFB) in 2016 has target setting that quite fantastic.

According to RFB's President Director, Teddy Prasetya, futures broker who are the members of Jakarta Futures Exchange – JFX will be the leading brokerage firms with the most active transaction value in main sequence.

"It will not be in this year, but in next year 2016," Teddy said optimistically.

To reach the target, he was determined to boost transaction value of multilateral futures contract.

"Currently our main commodity is gold and olein."

"Next year we will actively promote coffee commodity contract with the mechanism of physical market that also part of multilateral futures contract," Teddy explained.

His interest on coffee product is not without a reason. Teddy said that Indonesia is the third biggest coffee exporter after Brazil and Vietnam.

"But unfortunately, Indonesia has no bargain power in determining world coffee prices."

Therefore, He wants coffee products can be commenced in the near future.

"This will become short term target as RFB President Director," He said.

Nevertheless, Teddy realizes that it will not be as easy as turning the hand palm. Careful preparation is still undergoing, starting from collection the physical market players until asking JFX support.

"This will be a challenging work, therefore I am asking support from all parties," Teddy Prasetya emphasized. 

SITNa increases the transparency of Futures Trading

P T Kliring Berjangka Indonesia (Pty Ltd) collaborates with Jakarta Futures Exchange (JFX) has launched Customer Transaction Information System – SITNa to increase the transparency of commodity futures trading in Indonesia.

By using this service, customers will be able to monitor their transactions in futures broker firm.

JFX President Director, Stephanus Paulus Lumintang said that the collaboration was meant to increase the transparency and to give service to customers of commodity futures trading industry.

"SITNa will give additional information from regulator to customer on all transactions that have been done. So in addition of transaction monitoring via transaction confirmation report provided by futures broker, every customer who has futures contract transaction will be able to monitor their transaction result via SITNa in real time," Paulus said on SITNa's launching in Jakarta on last November the 4th 2015.

Paulus added that SITNa will automatically facilitate futures broker firm to persuade investor on doing futures trading transaction. In line with that point, KBI's President Director, Tris Sudarto said that with SITNa's presence, people will be well educated and will use this as alternative information.

"This service will increase customer's trust, give comfort transaction and increase transparency, also increase positive image of futures trading industry," Tris Sudarto explained.

Base on KBI's record, currently customer numbers that have been recorded doing futures contract transactions is among 110,000 accounts. Meanwhile market capitalization in JFX until the end of October 2015 has reached 1.05 billion rupiahs. 





0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Bambang Irwansyah

Delitua, Medan. +6281345xxxxx

Tanya;

Dari informasi yang kami peroleh, bahwa sejak tahun 2008 pemerintah telah membangun gudang SRG di sejumlah daerah, namun untuk kepastiannya kami bertanya, pertama, ada berapa banyak gudang SRG yang telah di bangun pemerintah dan di daerah mana saja? Kedua, sudah berapa banyak resi gudang yang diterbitkan?

Jawaban:

Yth. Bapak Bambang Irwansyah, benar bawah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan telah membangun gudang SRG sejak tahun 2008 di sejumlah daerah. Pembangunan gudang SRG itu dilakukan setelah payung hukum SRG terbit dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2006, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 Tahun 2011.

Gudang SRG yang telah dibangun pemerintah ada di 58 kabupaten/kota dari 14 provinsi, masing-masing Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Secara kumulatif sampai akhir November 2015, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 2.125 resi dengan total volume komoditas sebanyak 8.077,96 ton gabah; 6.499,22 ton beras; 5.101,07 ton jagung; 153,27 ton kopi; 420 ton rumput laut; dan 3,14 ton kakao.

Untuk lebih lengkap informasi SRG, Bapak dapat mengakses www.bappebti.go.id.

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

**SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)*

Glossary

1. Chartist

Technical trader who reacts to signals read from graphs of price movements.

2. Cheap

Colloquialism implying that a commodity is underpriced.

3. Cheapest to Deliver

A method to determine which particular cash debt instrument is most profitable to deliver against a futures contract.

4. Cheapest-to-Deliver

Usually refers to the selection of bonds deliverable against the expiring bond futures contract.

5. Chicago Board of Trade (CBOT):

Founded in 1848 with 82 original members, it had an active cash and forward contracting business at first. Although the records were destroyed in the fire of 1871, it is agreed that futures contracts were being traded there during the 1860s. Today, the CBOT is the largest exchange in the world. It is known for its grain, gold, and Treasury Bond futures, as well as options on T-Bond futures. The Chicago Board of Trade is located at 141 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60604.

6. Chicago Mercantile Exchange (CME)

The second largest futures exchange in the United States. Originally formed in 1874 as the Chicago Produce Exchange, the "Chicago Merc" was primarily a perishable agricultural products market (butter, eggs, poultry, etc.). The name was changed in 1919, and since then the CME has been an innovator in the industry. The CME trades financial futures, options, and stock index futures contracts. The CME is the largest exchange for futures contracts in live commodities, foreign currencies, and Eurodoll

7. Chooser Option

An option which is transacted at the present but which at some prespecified future date is chosen to be either a put or a call option.

8. Churning

Excessive trading of an account by broker with control of the account for the purpose of generating commissions while disregarding the interests of the customer.

9. Circuit Breaker

A system of trading halts and price limits on equities and derivative markets designed to provide a cooling-off period during large, intraday market declines. The first known use of the term circuit breaker in this context was in the Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (January 1988), which recommended that circuit breakers be adopted following the market break of October 1987.

10. Class (of options)

Options of the same type (i.e., either puts or calls, but not both) covering the same underlying futures contract or physical commodity (e.g., a March call at strike price 62 and a May call at strike price 58).

Perkembangan Transaksi Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Bulan Oktober 2015

No.	Penyelenggara	Tanggal	Nilai Transaksi	Pelaku		Komoditi
				Penjual	Pembeli	
1	Jawa Tengah	21-Oct-15	Rp12.711.700.000	31	3	11
2	Sumatera Barat	7-Oct-15	Rp496.230.500	52	5	10
3	Sulawesi Utara	20-Oct-15	Rp1.812.700.000	21	6	7
4	Jambi	20-Oct-15	Rp2.209.600.000	41	2	16
5	Yogyakarta	20-Oct-15	Rp1.110.100.000	33	2	6
6	Jawa Timur	20-Oct-15	Rp6.203.500.000	16	2	7
7	Sulawesi Tenggara	22-Oct-15	Rp268.800.000	9	3	4
8	NTB	29-Oct-15	Rp1.640.500.000	18	4	12
9	Bali	22-Oct-15	Tdk Ada Transaksi			
10	Gorontalo	15-Oct-15	Rp1.882.000.000	11	2	3
11	Sulawesi Selatan	22-Oct-15	Rp2.562.300.000	3	1	2
Jumlah			Rp30.897.430.500	235	30	78

BAPPEBTI

SRG Sarana Tunda Jual Komoditas

Suasana percakapan di taman,,, Pebti sedang duduk di kursi taman dan Mr. B menghampiri



Hai,,, Pebti, tumben main di taman ini,,,? Apakah kamu tidak ada kegiatan?

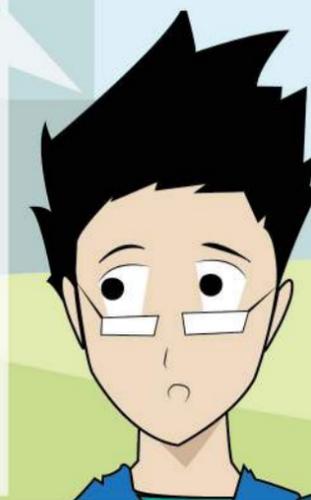
Kamu ya Bee,,,? Kirain tadi siapa,,,,, Apa kabar mu Bee? Hari ini gak ada kuliah?

Bee,,, kamu 'kan kuliah di jurusan ekonomi? Tanya dong, apa bedanya SRG dengan Pegadaian?

Wahhh,,, kamu makin pintar nih soal SRG?

Aku bisa ngerti SRG 'kan, dari kamu Bee,,,, Kenapa aku tanyakan itu, karena tadi saat aku menemani mama ke pasar, aku lihat ada Pegadaian,,, dan lihat ada banyak ibu-ibu didalamnya.

heheee,,, kalau soal perbedaannya tentu ada dong. Tetapi prinsipnya hampir sama, kalau SRG itu 'kan komoditi pertanian yang di simpan di gudang yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan di Pegadaian, yang menjadi jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor dan lainnya. Bedanya lagi, kalau di Pegadaian itu biasanya orang yang menjaminkan barang untuk keperluan mendesak atau permodalan yang sesuai dengan nilai barangnya. Sedangkan kalau Resi Gudang, petani menitipkan komoditinya di gudang untuk menghindari harga jual yang cenderung rendah di saat masa panen. 'Nah, Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan komoditi yang tersimpan di gudang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.



Oh, begitu??? Jadi kalau harga komoditinya naik dipasaran, bagaimana?

Dalam mekanisme Resi Gudang maupun Pegadaian, 'kan ada jatuh temponya, Peb? Jadi kalau harga komoditi naik sebelum jatuh tempo, petani bisa menjualnya di pasar dan melunasi pinjamannya ke bank.

Artinya, dengan kondisi seperti itu petani tidak akan rugi, ya Bee?

Tentu Peb,,, apa lagi ada program pemerintah yang meringankan tingkat suku bunga pinjaman SRG untuk petani sebesar 6 %. Jadi double 'deh keuntungannya kalau petani simpan komoditasnya di gudang SRG. Makanya, SRG itu juga disebut sebagai tunda jual.

Pebti : Wuiihhh,,, pintar banget 'sih lo Bee,,,? ^_^



SRG Jadi Etalase Pemda di Era MEA

Eddy SL Purba *)

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA tinggal menghitung hari, tepatnya 31 Desember 2015, mendatang. Pertanyaanya, sudahkah Pemerintah Daerah mempersiapkan diri menyambut era baru tersebut?

Salah satu instrumen yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di era MEA nanti adalah Sistem Resi Gudang- SRG. Sebab dengan SRG, Pemerintah Daerah dapat menjaga stabilitas ekonomi khususnya dalam perdagangan komoditi unggulan.

Sebagai contoh, di saat masa panen raya komoditi pangan mengalami kecenderungan tren harga yang menurun, komoditi pangan dapat disimpan di gudang SRG. Dengan penyimpanan komoditi tersebut, petani pemilik komoditi akan memperoleh Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan. Dan dengan Resi Gudang tersebut, petani dapat menjaminkannya ke lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan. Sedangkan di saat harga komoditi mengalami tren naik, petani dapat menjual komoditinya dan mengembalikan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dengan mekanisme seperti di atas, ketersediaan komoditi pangan di daerah akan tetap terjaga, sehingga petani dapat terhindar menjual komoditinya di saat harga rendah. Dan di sisi lain, petani tetap dapat melanjutkan usaha budidayanya. Yang lebih penting lagi dari mekanisme SRG itu, pemerintah tidak perlu melakukan impor komoditi pangan di saat masa pacelik.

Seiring dengan berlakunya MEA, mekanisme SRG dapat dijadikan Pemerintah Daerah sebagai benteng pertahanan perdagangan komoditi. Sebab, di masa berlakunya MEA tersebut, dapat dipastikan kemudahan perpindahan baik arus barang atau komoditi maupun sumber daya manusia dari satu negara ke negara lain anggota ASEAN. Atau dengan kata lain, MEA merupakan pasar tunggal negara-negara ASEAN.

Dengan kondisi seperti itu, maka perdagangan komoditi akan semakin

terbuka. Seperti ketika terjadi kelangkaan suatu komoditi di daerah tertentu, maka dengan mudah komoditi impor dari negara anggota ASEAN untuk masuk ke daerah bersangkutan. Jika hal itu yang terjadi, maka dapat dipastikan devisa negara akan terserap ke negara anggota ASEAN lain dan berdampak pada daya saing petani semakin rendah.

Daya Saing Tinggi

Kajian yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan tema 'Dampak MEA Terhadap Sektor Industri dan Jasa serta Tenaga Kerja di Indonesia', pada Desember 2014, lalu, jelas digambarkan bahwa MEA akan memunculkan berbagai peluang serta tantangan bagi negara-negara yang termasuk di dalamnya. Bagi Indonesia, terbentuknya pasar tunggal ini membawa konsekuensi pada kesiapan sumber daya yang dimiliki, yaitu apakah sumber daya yang ada sudah siap

berkompetisi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Dari pembelajaran mengenai perdagangan antar negara ada dikenal istilah *comparative advantage*, yaitu di mana suatu negara akan menghasilkan serta kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar, dan sebaliknya akan mengimpor barang yang memiliki *comparative disadvantage*.

Atau dapat juga dikatakan, suatu negara akan mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri di dalam negeri akan memerlukan biaya yang besar. Juga dapat dinyatakan bahwa nilai suatu barang akan ditentukan dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan makin mahal harga barang tersebut. Sedangkan jika dilihat dari *comparative cost*-nya, perdagangan antar negara yang akan menguntungkan timbul jika masing-masing negara memiliki *comparative cost* yang terkecil. *Comparative cost* ini mengukur nilai suatu barang yang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Dari kajian yang dilakukan itu, jelas tampak bahwa Pemerintah Daerah sangat berkepentingan dan berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan daya saing komoditi unggulannya.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan, dalam perdagangan Indonesia ke negara-negara ASEAN, komoditas agro yang memiliki daya saing tinggi antara lain tembakau sebesar US\$ 435 juta, minyak/lemak nabati US\$ 363 juta, kakao US\$ 360 juta. Sedangkan jika dilihat dari *market share*-nya, komoditi kopi memiliki pangsa pasar sebesar 41,4 %, kakao dan coklat (63,4 %), minyak nabati (53,4 %) dan tembakau (32 %).

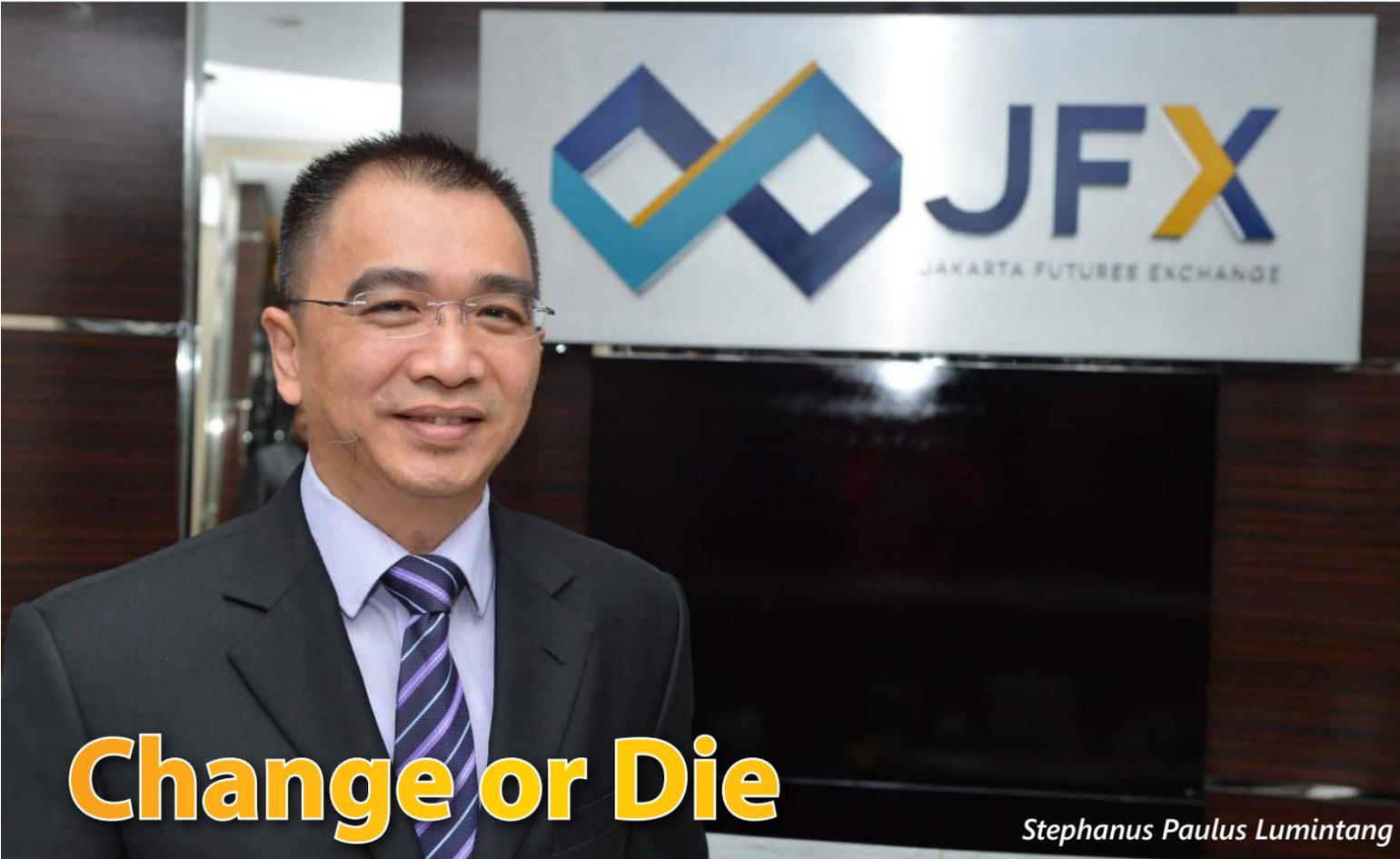
Strategis

Dalam kaitannya dengan SRG, komoditi kakao dan kopi sangat memiliki nilai strategis. Sebab komoditi kakao dan kopi tidak saja menjadi kebutuhan dalam negeri dengan intensifnya pemerintah mendorong hilirisasi industri, melainkan juga untuk tujuan ekspor. Sehingga dengan adanya gudang SRG kakao dan kopi yang dikembangkan Kementerian Perdagangan sejak tahun 2008 di sejumlah daerah, Pemerintah Daerah dapat menjadikannya sebagai posisi tawar di era berlakunya MEA. Di sisi lain, gudang SRG juga dapat dimanfaatkan sebagai *inventory* untuk memperoleh harga yang terbaik dan kepastian suplai bagi kebutuhan industri di dalam negeri.

Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk intensifikasi gudang SRG tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Di samping itu, petani juga akan memiliki jaminan pasar dengan harga yang wajar. Sehingga pada akhirnya petani memiliki posisi tawar dan motivasi tinggi untuk meningkatkan produktivitasnya.

Dari data Bappebti, dari periode Januari hingga akhir Oktober 2015, nilai Resi Gudang komoditi kopi telah mencapai lebih dari Rp 4,8 miliar. Sedangkan Resi Gudang komoditi kakao yang baru terbit di bulan Oktober 2015 yakni sebesar Rp 78 juta.

Sementara itu, gudang SRG kopi yang telah dibangun pemerintah saat ini terdapat sebanyak empat gudang, masing-masing di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Kepahiang dan satu gudang swasta (PT Gunung Lintong) di Kab. Deli Serdang. Sedangkan untuk komoditi kakao terdapat satu unit yang telah menerbitkan Resi Gudang yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Barat. *)*Pemerhati Perdagangan Berjangka Komoditi.*



Change or Die

Stephanus Paulus Lumintang

Stephanus Paulus Lumintang memiliki komitmen untuk membawa perubahan bagi Jakarta Futures Exchange- JFX ke arah yang lebih baik. Di tangannya, JFX di tahun 2018 ditargetkan likuid untuk kontrak multilateral. Mampukah?

Menempati kursi nomor satu di JFX bukanlah perkara mudah. Masih banyak 'PR' (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan agar tetap eksis dan berkembang menjadi bursa berjangka yang handal. Hal itu tentu saja disadari oleh Stephanus Paulus Lumintang, atau yang akrab disapa Paulus saat resmi menerima mandat sebagai Dirut JFX, 30 Juni 2015 lalu.

Di awal menjabat, Paulus membuat gebrakan dengan mendorong peningkatan sinergitas, baik itu di internal maupun di eksternal JFX. Di sisi internal, dia menanamkan loyalitas pegawai supaya berkomitmen tinggi dalam bekerja. "SDM harus lebih siap, lebih mapan dan lebih inovatif," kata Paulus saat ditemui **Buletin Bappebti**, di ruang

kerjanya, belum lama ini. Karenanya, menurut Paulus, setiap individu di JFX harus dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. "Dan perubahan itu sudah mulai dilakukan di internal JFX," tegasnya. Meski begitu, dia bilang, hendaknya jangan merasa puas untuk terus menjadi lebih baik.

Dari kacamata pria yang telah menggondol titel MBA dari Filipina ini, SDM yang dimiliki JFX memang sudah kompeten. Tim-nya pun sudah lengkap. Saat ini, hanya perlu dorongan kuat agar setiap personil di JFX mau mengeluarkan semua kemampuannya untuk bekerja.

"Saya mengajak mereka untuk lebih solid, bersatu dan mendukung, serta saling mengoreksi. Di sini (JFX) saya tanamkan kekeluargaan, tidak ada yang dominan dan masing-masing

bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak perlu melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Prinsipnya, kami optimis membawa JFX menjadi lebih baik ke depannya," ujar Paulus.

Sementara itu, untuk sinergitas di eksternal, JFX akan lebih sinkron dengan Lembaga Kliring Berjangka dan seluruh anggota Bursa Berjangka. Karena pada prinsipnya, diperlukan kerjasama yang baik untuk mencapai keberhasilan.

Di sisi lain, Paulus menyadari belum likuidnya transaksi kontrak berjangka multilateral. "Kalau untuk saat ini transaksi multilateral masih dalam proses likuid."

Memang tak bisa dipungkiri, pencapaian transaksi kontrak komoditi multilateral belum sesuai dengan amanat UUPBK untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan pembentukan harga (*price discovery*).

Lantaran itu, dia menargetkan, transaksi multilateral di JFX akan likuid pada tahun 2018. "Maksimal tahun 2020, target itu akan tercapai," ungkapnya.

Salah satu cara untuk mencapai target itu, lanjutnya, JFX tidak akan banyak meng-*create* produk. Adapun target lainnya, Paulus juga akan menghidupkan lebih banyak perdagangan fisik atau pasar fisik komoditi. "Ini penting untuk fondasi peningkatan transaksi multilateral."

Intinya, di bawah nahkoda Paulus, JFX akan terus melakukan perubahan untuk berbenah diri mewujudkan industri perdagangan berjangka komoditi yang lebih baik di masa mendatang. "Saya mengenal satu filosofi '*change or die*'. Jadi, jika ingin berubah, harus drastis alias tidak bisa setengah-setengah. Filosofi itu juga yang saya tanamkan pada teman-teman di internal JFX," ujar pria berdarah Manado ini.

Dia pun bertekad, JFX akan dapat terus menjaga reputasi, integritas dan kepercayaan publik dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan. "Saya ingin JFX menjadi institusi yang sehat, bersih, dan bermartabat."

Pribadi Disiplin

Jejak kaki Paulus di industri PBK terhitung belum terlalu lama.

Karirnya dimulai sebagai Kepala Divisi Audit dan Pengawasan JFX pada tahun 2008 silam. Lalu, pada tahun 2011, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, JFX. Selanjutnya, Paulus diberi kepercayaan menjadi Plt. Direksi pada April 2015 lalu. Kemudian, dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Paulus resmi didaulat sebagai Dirut JFX pada 30 Juni 2015.

Meski dapat dibilang sebagai pendatang baru di industri PBK, tapi rekam jejaknya secara pribadi berbicara lain. Sejak usia 16 tahun, pria kelahiran Tegal, 4 Juni 1971 ini, telah mengenal dan belajar banyak tentang komoditi. Saat itu, dia sudah mampu bergelut dengan berbagai komoditi perkebunan dan pemasaran komoditi cengkeh di Sulawesi Utara.

"Saat saya sudah duduk di bangku SMA, sepulang sekolah waktu saya banyak membantu bisnis paman saya yang menjadi salah satu orang kepercayaan di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh- BPPC," terangnya.

Tak hanya itu, dia juga lama merantau di Medan. Di kota ini, dia banyak mengenal beragam komoditi, mulai dari kopi, kakao, kayu manis, lada, dan lainnya. Pengalamannya itulah yang menjadi modal besar saat dia harus terjun ke dunia PBK.

Ayah dari satu orang anak ini, juga dikenal memiliki pribadi yang disiplin dan haus akan ilmu. Tak heran, saat



menempati posisi puncak di JFX, dia tak sungkan untuk lebih banyak belajar sebagai pemimpin yang serba bisa. "Orang belajar satu, saya belajar sepuluh. Saya mempelajari sesuatu sampai detail, karakter saya seperti itu," ucap Paulus.

"Saya juga berusaha lebih *wise-bijaksana*, lebih banyak melayani, dan banyak mengontrol diri," sambungnya.

Bagi Paulus, kehadirannya di JFX merupakan sebuah wujud nasionalisme. Pasalnya, dia pernah menolak tawaran kerja di perusahaan asing yang beroperasi di Singapura, yang notabene sangat menjanjikan dari sisi finansial. Justru, saat itu dia lebih memilih untuk bekerja di JFX. "Saya akan buktikan, saya ada untuk JFX dan untuk negeri ini," tandas Stephanus Paulus Lumintang. **S**

A man wearing a grey cap, a white long-sleeved shirt over a black t-shirt with 'ALPN 5 SENSAR' printed on it, and dark shorts is standing in a vast field of golden rice. The background shows a clear blue sky, some green trees, and distant hills. The overall scene is bright and sunny.

Manfaatkan SRG & Tingkatkan Kesejahteraan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti
www.bappebti.go.id